



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Judul Tugas Akhir Skripsi:

**DINAMIKA POLITIK PENYUSUNAN PKPU NO. 14 TAHUN 2024:
PERUBAHAN SANKSI DISKUALIFIKASI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA**

Tugas akhir skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

Nama : Nabilla Adika Putri

NIM : 2110413109



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN JAKARTA**



**DINAMIKA POLITIK PENYUSUNAN PKPU NO. 14 TAHUN 2024:
PERUBAHAN SANKSI DISKUALIFIKASI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA**

SKRIPSI

NABILLA ADIKA PUTRI

2110413109

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Nabilla Adika Putri
NIM : 2110413109
Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2026

Yang Menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp is primarily red with black text and a black border. It contains the text 'KETERANGAN' at the top, 'METERAI' in the middle, and 'TEMPEL' at the bottom. Below this, there is a unique alphanumeric code '2110413109X274617260'. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Nabilla Adika Putri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI / TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Adika Putri
NIM : 2110413109
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**DINAMIKA POLITIK PENYUSUNAN PKPU NO. 14 TAHUN 2024:
PERUBAHAN SANKSI DISKUALIFIKASI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Februari 2026

Yang menyatakan,



(Nabilla Adika Putri)

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Adika Putri
NIM : 2110413109
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Dinamika Politik Penyusunan PKPU No. 14 Tahun 2024:
Perubahan Sanksi Diskualifikasi dan Pengaruhnya
Terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak saya bebas royalti kepada Perpustakaan UPNVJ atas Penelitian karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah pangkalan data (database), mendistribusikan, serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UPNVJ, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Peneliti/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UPNVJ dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan semoga digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 3 Februari 2026
Yang menyatakan,



(Nabilla Adika Putri)

PENGESAHAN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR JURNAL

NAMA : Nabilla Adika Putri
NIM : 2110413109
PROGRAM STUDI : Ilmu Politik
JUDUL : Dinamika Politik Penyusunan PKPU No. 14 Tahun 2024: Perubahan Sanksi Diskualifikasi dan Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing

(Lia Wulandari S.Sos., M.PP)

Penguji 1

(Dr. Nurdin, S.Pd., M.Si.)

Penguji 2

(Muhammad Prakoso Aji, S.Sos., M. IP)

Ketua Program Studi
Ilmu Politik

Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Rabu, 17 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika politik dalam penyusunan PKPU No. 14 tahun 2024 dengan adanya penghapusan sanksi. Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori proses kebijakan publik William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sanksi diskualifikasi dalam PKPU No. 14 tahun 2024 dilatarbelakangi oleh tidak adanya ketentuan sanksi diskualifikasi dalam UU No. 10 Tahun 2016 bagi pasangan calon yang terlambat atau tidak melaporkan LPPDK. Oleh karena itu, sanksi tersebut diganti dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis agar disesuaikan dengan ketentuan UU. Perubahan ini menuai kontra dari LSM seperti ICW dan Perludem yang menganggap penghapusan sebagai bentuk kemunduran penegakan aturan dana kampanye. Perubahan sanksi berdampak terhadap pelaporan dana kampanye dan penyelenggaraan Pilkada. Pemberian sanksi administratif dan toleransi waktu pelaporan LPPDK dapat membuka ruang ketidakpatuhan pasangan calon dalam pelaporan dana kampanye. Meskipun KPU sebagai lembaga independen memiliki wewenang dalam penyusunan substansi PKPU, proses penyusunan melalui rapat konsultasi dengan melibatkan KPU, *stakeholder*, DPR dan Pemerintah dapat membuka ruang konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi KPU dalam pengambilan keputusan regulasi.

Kata Kunci: PKPU No. 14 Tahun 2024, Sanksi Diskualifikasi, Pilkada, Kebijakan Publik, Proses Konsultasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the political dynamics in the drafting of PKPU No. 14 of 2024 with the removal of sanctions. This study uses Michel Foucault's theory of power relations and William Dunn's theory of public policy processes. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach. Data was obtained through interviews using purposive sampling techniques and literature studies. The results of this study indicate that the change in disqualification sanctions in PKPU No. 14 of 2024 was motivated by the absence of provisions for disqualification sanctions in Law No. 10 of 2016 for candidate pairs who were late or failed to report their LPPDK. Therefore, the sanction was replaced with an administrative sanction in the form of a written warning to comply with the provisions of the law. This change drew criticism from NGOs such as ICW and Perludem, which considered the removal a setback in the enforcement of campaign finance regulations. The change in sanctions has an impact on campaign finance reporting and the implementation of regional elections. The imposition of administrative sanctions and tolerance for LPPDK reporting deadlines could open up opportunities for candidate pairs to be non-compliant in reporting campaign funds. Although the KPU, as an independent institution, has the authority to draft the substance of PKPU, the drafting process through consultation meetings involving the KPU, *stakeholders*, the DPR, and the government could open up opportunities for conflicts of interest that could affect the KPU's independence in regulatory decision-making

Keywords: PKPU No. 14 of 2024, Disqualification Sanctions, Regional Elections, Public Policy, Consultation Process

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinamika Politik Penyusunan PKPU No. 14 tahun 2024: Perubahan Sanksi Diskualifikasi dan Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pilkada untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan sejak Oktober 2025.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Allah SWT atas berkat dan karunianya telah memberikan kesehatan, akal, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
2. Orang Tua yang selalu memberikan doa, mendukung, dan mendampingi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas seluruh dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melalui segala permasalahan dan hambatan yang ditemui selama proses penyelesaian skripsi
3. Ibu Lia Wulandari S.Sos.,M.PP. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membantu, memberikan nasihat, memberikan masukan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
4. Dr. Nurdin selaku penguji I dan Muhammad Prakoso Aji, S.Sos., selaku penguji II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran, kritik, dan penilaian terhadap skripsi ini
5. Ibu Restu Rahmawati, S. IP., M.HI selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik
6. Bapak Dr. Deni Angela selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu bermanfaat pada masa perkuliahan

8. Seluruh Narasumber yang telah bersedia dan meluangkan waktunya secara sukarela dalam memberikan data dan informasi yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi
9. Sahabat penulis, Alifia, Cinta, Davina, dan Shelma terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan, waktu, memberikan kepercayaan kepada penulis untuk dapat melewati dan menyelesaikan skripsi dengan baik, serta selalu bersedia mendengar keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih selalu menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak yang telah disebutkan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang politik dan hukum pemilu serta bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 3 Februari 2026



Nabilla Adika Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Batasan Masalah.....	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.4.1. Tujuan Praktis	11
1.4.2. Tujuan Teoritis.....	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1. Manfaat Akademis	12
1.5.2. Manfaat Praktis	12
1.6. Sistematika Penelitian	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Teori dan Konsep Penelitian	26
2.2.1. Teori Relasi Kuasa	26
2.2.2. Teori Proses Kebijakan Publik.....	29
2.2.3. Konsep Kewenangan DPR dalam Peraturan Pendanaan Kampanye	36
2.2.5. Konsep Laporan Dana Kampanye	38
2.3. Alur Penelitian.....	40
BAB III.....	41
METODOLOGI PENELITIAN	41

3.1.	Objek Penelitian	41
3.2.	Jenis Penelitian	41
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	42
3.3.1.	Wawancara.....	42
3.3.2.	Studi Kepustakaan atau Dokumen	44
3.4.	Sumber Data	44
3.4.1.	Data Primer	44
3.4.2.	Data Sekunder	44
4.4.1.	Data Primer..	44
3.5.	Teknik Analisis Data	44
3.5.1.	Teknik Analisis Data.....	45
3.5.2.	Reduksi Data	45
3.5.3.	Penyajian Data	45
3.5.4.	Penarikan Kesimpulan	46
3.6.	Teknik Keabsahan Data.....	46
3.7.	Tabel Rencana Waktu.....	47
BAB IV		49
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.1.1.	Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)	49
4.1.2.	Tugas dan Wewenang KPU	51
4.2.	Tahapan Umum Penyusunan Peraturan KPU.....	54
4.2.1.	Mekanisme Pembentukan Peraturan KPU	54
4.2.2.	Proses Penyusunan PKPU No. 14 tahun 2024	57
4.2.3.	Proses Konsultasi PKPU No. 14 tahun 2024 Melalui Rapat Dengar Pendapat.....	61
4.3.	Dinamika Politik Perubahan Sanksi Diskualifikasi dalam PKPU No. 14 tahun 2024	65
4.3.1.	Latar Belakang Perubahan Sanksi Diskualifikasi dalam PKPU No. 65 14 tahun 2024.....	65
4.3.2.	Perbandingan PKPU No. 14 tahun 2024 dengan PKPU No. 5 tahun 70 2017	70
4.3.3.	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Penyusunan PKPU No. 14 tahun 2024 ..	74

4.3.4.	Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Proses Konsultasi	
	76	
	Penyusunan PKPU No. 14 tahun 2024	76
4.3.5.	Fungsi Pengawasan DPR dalam Penyusunan PKPU No. 14 tahun	79
	2024	79
4.3.8.	Penolakan Lembaga Atas Penghapusan Sanksi Diskualifikasi.....	80
4.4.	Konflik Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) dalam Penyusunan Peraturan	
	KPU 87	
4.4.	Pelanggaran Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	
	Kampanye (LPPDK) dalam Pelaksanaan Pilkada.....	93
4.4.	Dampak Perubahan Sanksi dalam PKPU No. 14 tahun 2024 Terhadap	
	Kandidat dan Pelaksanaan Pilkada	96
4.4.1.	Manfaat Penghapusan Sanksi Diskualifikasi Terhadap Pasangan	
	Calon 96	
4.4.2.	Perubahan Sanksi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas	98
	Pelaporan Dana Kampanye.....	98
4.4.3.	Pelanggaran Laporan Dana Kampanye dalam Pilkada 2024	100
4.4.4.	Efektivitas Penghapusan Sanksi dalam Pelaporan Dana Kampanye	
	105	
	Pilkada 2024	105
4.4.5.	Penghapusan Sanksi Diskualifikasi Terhadap Pelaksanaan Pilkada	
	107	
4.5.	Implikasi Proses Penyusunan Peraturan KPU Terhadap Independensi	
	KPU 110	
4.5.1.	Kemandirian KPU	110
4.5.2.	Proses Konsultasi dalam Penyusunan PKPU	111
4.5.3.	Independensi KPU dalam Proses Penyusunan PKPU.....	113
	DAFTAR PUSTAKA	125
	RIWAYAT HIDUP	131
	LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Penyampaian LADK Partai Politik.....	5
Tabel 2 Perbedaan Ketentuan Sanksi	8
Table 3 Pasangan Cakada 2024 Penerima	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Policy Making Process	30
Gambar 2 Pelaksanaan Uji Publik Terhadap Rancangan PKPU Kampanye dan Dana Kampanye Pilkada 2024	58
Gambar 3 Proses Rapat Dengar Pendapat (RDP)	61
Gambar 4 Penyampaian Sistematika Rancangan	63
Gambar 5 Penjelasan Komisioner KPU RI Idham Holik.....	66
Gambar 6 Penyampaian Kritik oleh Perludem.....	81
Gambar 7 Jumlah Penyumbang Pasangan	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Sidang Akhir.....	132
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	133
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	141
Lampiran 4. Transkrip Wawancara.....	144
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi.....	210